

INDEPENDENSI MEDIA SEBAGAI INSTITUSI *PUBLIC SPHERE*

Tuti Widiastuti

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
tuti.widiastuti@bakrie.ac.id

Abstract

This paper is written based on the assumption that mass media in Indonesia hold the principal social responsibility press theory. Regarding to West democratic system that appreciate to media independency through press theory named 'the theory of press freedom', the media independency come from freedom of journalism role and political process that has been introduced by Thomas Paine, John Stuart Mill, Alex de Tocqueville, etc. Media is seen as an institution has responsibility to society and media owner within several factors such as public trust, truth principles, accurate, honest, objective, and relevant. The implications of those factors are media independently to regulate them with follow ethic and professionalism code of conduct to protect public interest.

Keyword: *press freedom, public sphere, universal pragmatics*

Pendahuluan

Konsep “*independency*” dari media massa di Indonesia dewasa ini, terkait dengan iklim kebebasan bersuara dan berpendapat yang dicanangkan seiring dengan runtuhnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi. Tapi kebebasan yang ada bukanlah kebebasan tanpa batas. Misalnya untuk para jurnalis ada yang dinamakan UU Pers yang mengikat semua pekerja media, dan adanya UU Penyiaran yang mengatur bidang penyiaran mulai dari perijinan, permodalan dan praktek-praktek penyebaran informasi lainnya.

Banyak pihak dan bahkan para pekerja media itu sendiri menyatakan bahwa media massa di Indonesia memegang prinsip ‘teori pers tanggung jawab sosial’. Dengan asumsi bahwa media memiliki tanggung jawab pada masyarakat dan kepemilikan media adalah sebuah kepercayaan publik, media memegang prinsip-prinsip kebenaran, akurat, jujur, objektif dan relevan, media bebas tapi memiliki regulasi sendiri, media mengikuti kode etik dan profesiona-

lisme yang disepakati, dan dalam suatu waktu pemerintah harus mengintervensi media untuk melindungi kepentingan publik.

Dalam kasus media massa di Indonesia, media memiliki posisi yang *powerful* dalam proses perubahan politik dan terciptanya tatanan politik yang demokratis. Hal ini ditandai dengan upaya media yang berhasil melibatkan dan mendorong partisipasi rakyat dalam aktivitas politik negara seperti yang pernah terjadi khususnya pada masa kemunculan era Reformasi 1998. Media dalam hitungan detik selalu menyajikan berita politik terbaru menjelang turunnya penguasa Orde Baru, Soeharto. Ini jelas menandakan bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam proses reformasi tersebut yaitu media mengkonstruksi wacana politik sebagai upaya menyediakan ruang publik yang ingin beropini terhadap rezim pemerintahan terdahulu yang senantiasa membungkam suara rakyatnya.

Kondisi ini menurut Schulz (1997) jelas merupakan model *media-constructed*

public sphere yaitu bahwa media memiliki peran pusat dalam menjalankan sistem politik yang merupakan karakter dari *civil society*. Dalam situasi dan konteks seperti inilah media memegang teguh independensinya.

Menurut McQuail (2005), kebebasan sebagai sebuah prinsip dari kinerja media, yaitu *independent status*, *access to channels* dan *diversity of supply*. Status independen media tercermin dari keterpercayaan (*reliability*), yang disampaikan kepada audience adalah yang diliput oleh media sendiri (*originality*) dan posisi kritisnya (*critical stance*). Akses pada saluran dimaksudkan dengan peruntukan media dan ada banyak pilihan bagi semua orang, yang meliputi posisi kritis (*critical stance*) dan pilihan (*choice*), keragaman pasokan informasi termasuk dalam hal penyediaan pilihan (*choice*) dan perubahan (*change*).

McQuail (2005), menempatkan kebebasan media sebagai prinsip dasar dari teori-teori komunikasi publik yang berupaya untuk memberikan keuntungan bagi individu maupun masyarakat. Keuntungan tersebut meliputi: memungkinkannya pengawasan secara independen dan sistematis atas penguasa dan adanya informasi yang memiliki kehandalan tentang kegiatan mereka, sebagai stimulan atas sistem demokrasi dan kehidupan sosial yang aktif, adanya kesempatan untuk mengekspresikan gagasan, keyakinan dan pandangan tentang dunia, perubahan dan perbaikan budaya dan masyarakat yang berkesinambungan, dan meningkatkan jumlah dan variasi kebebasan.

Teori tentang Pers

Sejak abad ke-20 sistem demokrasi Barat sangat menghargai independensi media melalui 'teori pers'-nya yang kemudian disebut '*the theory of press freedom*' yang berasal dari kebebasan peran jurnalisisme dalam proses politik, seperti yang diungkapkan oleh berbagai pemikir liberal yaitu Thomas Paine, John Stuart Mill, Alex de

Tocqueville, dan sebagainya. Kebebasan tersebut terletak pada persoalan pemberitaan dan komentar yang mendalam untuk mendukung kemajuan demokrasi yang representatif. Tradisi Anglo-Amerika menyatakan bahwa kebebasan pers itu identik dengan gagasan kebebasan individu dan dengan filsafat politik liberal dan utilitarian. John Stuart Mill dalam bukunya *On Liberty* menyatakan bahwa perilaku membungkam (*silencing*) opini seseorang, sama halnya dengan merampok (*robbing*).

Untuk istilah media sebagai *four estate* dikemukakan oleh Edmund Burk pada akhir abad ke-18 di Inggris yang merujuk pada kekuatan politik yang dihadapi oleh pers. Kekuatan tersebut sering disebut sebagai *three estate*, misalnya di Inggris yaitu raja (*lord*), gereja (*church*) dan majelis perwakilan rendah (*commons*). Di sini pers berperan sebagai unsur keempat yang mengawasi ketiga kekuatan yang ada dalam suatu negara.

Menurut Siebert et.al. (1956), terdapat empat teori tentang pers yang menjelaskan hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat, yaitu:

1. Teori pers otoritarian, dalam faham ini, negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia yang mengungguli masyarakat dan individu. Pemikiran ini didasari pada pandangan Plato, filsuf Yunani kuno, yang mengidealkan negara yang dipimpin oleh sekelompok orang bijaksana atau setidaknya penasihat untuk para pemimpin masyarakat. Negara merupakan hal terpenting dalam mengatur perkembangan manusia seutuhnya. Dengan kata lain, di dalam dan melalui negara, manusia tetap menjadi makhluk primitif yang terus harus dipelihara dan dijaga pertumbuhannya. (2)
2. Teori pers komunis, dikenal dengan sebutan teori pers Soviet, yang didasarkan pada pemikiran dan pandangan Karl Marx dan dikembangkan oleh Stalin dan Lenin. Secara singkat dapat dikata-

- kan pers dalam negara komunis mempunyai tugas mengabdikan kepada kepentingan partai, dengan demikian unsur otoritarian menjadi sangat dominan di sini. (3)
3. Teori pers libertarian, kebalikan dari pandangan tentang teori pers otoritarian, yang penekanannya beralih kepada individu dan masyarakat. Faham ini sekaligus meragukan posisi negara sebagai ekspresi manusia tertinggi. Rasionalitas yang menjadi spirit pada abad ke-17 dan 18 melahirkan berbagai pemikiran tentang demokrasi. Fungsi utama masyarakat adalah memajukan kepentingan anggotanya. Jadi kebebasan bagi setiap individu dalam masyarakat untuk berkembang sangat diakomidiri. Dan (4)
 4. Teori pers tanggung jawab sosial, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pers libertarian. Teori ini bahkan muncul dari keprihatinan yang dibawakan oleh Komisi Kebebasan Pers. Salah satu penyebab lahirnya teori ini adalah karena revolusi teknologi dan industri yang mengubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika dan yang mempengaruhi pers. Dalam teori ini kemudian muncul kode etik pertama pada tahun 1923. Kode etik ini menghimbau agar pers bertanggung jawab juga terhadap kesejahteraan masyarakat, ketulusan, kejujuran, tidak memihak, seimbang, kesopanan dan menghormati kehidupan pribadi perseorangan.

Untuk itu Nordenstreng (1997), menyatakan lima paradigma teori normatif yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh pekerja media (dalam McQuail, 2002 : 161-162), yaitu: *Liberal-pluralist paradigm* (didasarkan pada teori libertarian), *Social responsibility paradigm* (hak kebebasan publikasi diiringi dengan kewajiban pada masyarakat luas yang melebihi kepentingan media tersebut), *Critical paradigm* (media memiliki potensi untuk pembebasan dan bukan

hanya dalam bentuk pelepasan diri dari kontrol institusi dominan), *Administrative paradigm* (media menyampaikan informasi bias teknokrat dan menguntungkan serta menyenangkan manajerial dan elit politik daripada massa), *Cultural negotiation paradigm* (paradigma ini menolak rasionalitas universal serta gagasan kompetensi dan efisiensi profesional-birokratik yang menekankan pada hak subkultur dengan nilai partikularistiknya dan mempromosikan pemahaman intersubjektif dan pengertian komunitas yang sebenarnya).

Transformasi Sosial Masyarakat Kapitalisme Lanjut

Habermas menyebut kondisi masyarakat saat ini berada dalam periode masyarakat kapitalisme lanjut (*late capitalism*). Dua ciri utama dari masyarakat kapitalisme lanjut, yaitu adanya pemusatan modal yang menghasilkan perusahaan nasional dan multinasional (MNC, *multinational corporation*) dalam bentuk oligopoli, dan repolitisasi massa yang berbeda dengan depolitisasi massa masyarakat liberal. Repolitisasi merupakan usaha untuk mengantisipasi krisis yang berlangsung dalam akumulasi modal masyarakat liberal. Negara melakukan intervensi pasar guna menghilangkan kesenjangan, dan bersamaan dengan munculnya pasar oligopoli, maka sistem kapitalisme liberal berakhir dengan sendirinya.

Namun demikian pada kenyataannya kapitalisme tidak hilang dari permukaan bumi, melainkan terus ada berkat kemampuannya menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi. Kini, kapitalisme liberal digantikan istilahnya dengan istilah kapitalisme lanjut (*late capitalism*). Kapitalisme lanjut menunjukkan bahwa sistem kapitalisme merupakan bentuk perkembangan masyarakat yang terdapat banyak kontradiksi dan krisis. Krisis yang muncul dalam sistem sosial merupakan kondisi yang faktual bagi masyarakat kapitalisme lanjut dalam menapaki proses transformasi sosial.

Memasuki perkembangan masyarakat kapitalis lanjut, sistem dan lingkungan akan menghadapi beberapa rintangan, yaitu rintangan ekologis, antropologis, dan hubungan internasional. Gangguan ekologis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengeksploitasi alam. Gangguan antropologis berkaitan dengan konsistensi kepribadian yang mengarah pada alienasi (keterasingan) individu. Gangguan hubungan internasional bertolak dari kemajuan teknologi yang dipergunakan untuk penghancuran sistem dunia seperti teknologi nuklir.

Krisis yang menjadi sarana perubahan formasi sosial dalam masyarakat kapitalis lanjut menurut Habermas dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu krisis ekonomi, politik, dan krisis sosio kultural. Hipotesis ini dikemukakan Habermas dengan menekankan kecenderungan munculnya krisis identitas yang mempengaruhi eksistensi, integrasi sosial, dan prinsip organisasi.

Dalil krisis identitas terdiri dari dua macam bentuk krisis, yaitu krisis legitimasi dan krisis motivasi. Krisis legitimasi dapat terjadi pada saat intervensi negara untuk menghadapi krisis ekonomi mengalami masalah legitimasi dari masyarakat. Sedangkan legitimasi dibutuhkan untuk *input* sistem yang menghasilkan kebijakan yang dapat dilegitimasi masyarakat. Krisis motivasi merupakan landasan bagi krisis legitimasi. Bagi krisis motivasi, perubahan sosio kultural adalah yang terpenting. Sedangkan krisis legitimasi mendasarkan pada intervensi negara yang membutuhkan legitimasi.

Untuk mengatasi krisis yang timbul pada perkembangan masyarakat kapitalisme lanjut, Habermas menggunakan etika komunikatif yang relevan dengan kondisi krisis. Dengan etika komunikatif, dapat diharapkan sifat umum dari norma-norma sehingga menjamin terwujudnya konsensus di antara anggota masyarakat. Etika komunikatif yang mampu melanggengkan norma-norma tersebut harus dibentuk melalui perbincangan yang bersifat universal dan menjamin terjadinya proses sosialiasi diser-

tai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat.

Pernyataan tersebut pada dasarnya mengacu pada pemikiran Habermas, bahwa transformasi sosial perlu diperjuangkan melalui dialog-dialog emansipatoris. Hanya melalui “jalan komunikasi” dan bukan “jalan dominasi” inilah diutopikan terwujudnya suatu masyarakat demokratis radikal, yaitu masyarakat yang berinteraksi dalam suasana “komunikasi bebas dari penguasaan” (dalam Hardiman, 2004 : 20-21).

Hal ini bertolak dari kritik Habermas terhadap pendahulunya di teori kritis karena dianggap mereka terjat di dalam “paradigma kerja”. Marx dan ketiga tokoh teori kritis (Horkheimer, Adorno, dan Marcuse) masih terjat dalam paradigma kerja, sehingga tidak bisa mencapai suatu solusi yang memuaskan ataupun yang membuka perspektif. Paradigma kerja oleh Marx dibawa kepada problematik alienasi, karenanya ada alienasi ekonomi, sosial, dan religius. Kemudian alienasi diteruskan juga oleh teori kritis, tetapi alienasi bukan sekedar alienasi ekonomi atau tidak terkonsentrasi pada alienasi ekonomi, melainkan pada bidang sosial budaya. Oleh karena itu Habermas membicarakan komunikasi sebagai dunia baru, yaitu dunia sosial budaya.

Pragmatisme Habermas, tradisinya teori kritis karena terdapat di dalamnya pendekatan dialektik dan pendekatan sejarah yang kuat, serta proses emansipasi juga kelihatan. Habermas lebih mengarah pada solusi-solusi terhadap kebuntuan-kebuntuan teori kritis. Dalam masyarakat kapitalisme lanjut, media komunikasi (termasuk di dalamnya media massa) dikuasai oleh kaum kapitalis (borjuasi). Inilah yang ingin ditembus oleh Habermas melalui *public sphere*, menembus media komunikasi yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Titik tolaknya adalah situasi masyarakat kapitalisme modern. Tapi yang dimaksudkan Habermas sebagai *public sphere* yang ideal bukan seperti *public sphere* yang ada pada

awal kemunculannya, tapi *public sphere* yang dicapai dengan menghadapi berbagai kendala yang terjadi di dalam kapitalisme modern. Oleh karena itu kelihatan proses historisnya.

Prinsip-prinsip Marx yang Habermas pakai dalam menganalisa kapitalisme modern, yaitu pandangan historis, dialektis, kesadaran revolusioner. Habermas telah mengkritik pengandaian-pengandaian dasar materialisme sejarah sebagai teori evolusi sosial. Dalil superstruktur telah dikritik bukan hanya karena determinisme yang terkandung di dalamnya, melainkan juga karena ide “basis” tak bisa dikaitkan secara universal dengan ekonomi. Dialektika materialistis dikritik karena memberi tafsiran teknologistic (tindakan rasional-bertujuan) pada krisis dan evolusi sosial.

Konsep materialisme sejarah tentang rentetan perkembangan cara-cara produksi sebetulnya mempermudah dalam menjelaskan evolusi sosial. Menurut Habermas, konsep ini dapat menata perkembangan sejarah dalam sebuah logika perkembangan. Akan tetapi Habermas menilai konsep ini tidak memadai, sebab tidak dapat mencakup segi-segi komunikatif yang mendasari formasi sosial baru pada setiap tahap. Dimensi komunikatif masyarakat itu terdapat dalam apa yang disebut “prinsip-prinsip organisasi sosial” yang menentukan formasi sosial tertentu. Dengan prinsip-prinsip organisasi sosial, Habermas mengartikannya sebagai inovasi-inovasi yang menjadi mungkin melalui tahap-tahap baru dari proses belajar masyarakat (Hardiman, 1993).

Habermas berpendapat bahwa prinsip-prinsip organisasi itu dapat dilihat pada inti institusional (misalnya kekerabatan, negara, ekonomi) yang menentukan bentuk integrasi sosial yang dominan. Habermas berpendapat bahwa proses belajar masyarakat secara evolusioner tergantung pada kompetensi individu-individu yang menjadi anggotanya. Kompetensi itu dikembangkan bukan secara individual dan terisolasi, me-

lainkan lewat interaksi sosial dengan medium struktur-struktur simbolis yang berasal dari dunia kehidupan (*Lebenswelt*) mereka. Sesuai dengan kompetensi tersebut, Habermas mengemukakan tiga tahap perkembangan kompetensi komunikatif, yaitu: *Pertama*, interaksi melalui simbol-simbol, dimana *speech act* masih berada dalam bentuk komunikasi tunggal. *Kedua*, tuturan dideferensiasikan, dalam tahap ini tindakan dipisahkan dari norma-norma dan melibatkan peran sosial individu di dalamnya. *Ketiga*, perbincangan (wacana) yang diargumentasikan meliputi kegiatan untuk menentukan validitas dari *speech-acts* (dalam Hardiman, 1993 : 112).

Kemudian menurut Habermas, kesadaran revolusioner tidak lagi dilaksanakan oleh kelompok buruh (proletar) ataupun tidak lagi dilakukan oleh kelompok partai, tapi dengan teori kritis hal ini mulai ditinggalkan karena kekuatan dominasi lebih luas lagi. Sehingga yang dikorbankan bukan hanya kelompok proletar, tapi juga masyarakat yang dikuasai. Inilah yang ingin ditembus oleh Habermas melalui teori *public sphere*, yang tidak bisa dicapai oleh pendahulunya dalam teori kritis. Habermas lebih mengarah pada komunikasi, sementara kerja sudah dibicarakan oleh Marx dan dielaborasi oleh pengikut-pengikutnya. Sekarang Habermas menampilkan paradigma baru, karena dulu paradigma komunikasi direduksi oleh Marx dalam paradigma kerja. Habermas mencoba untuk mengelaborasi paradigma komunikasi ini dengan membuka *public sphere* atau transformasi lewat *public sphere*.

Pengertian buruh sebagai kelompok atau klas yang digambarkan oleh Marx sudah tidak dipakai lagi. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, buruh tetap merupakan sebuah entitas yang riil, tetapi sekarang ini buruh-buruh yang sudah menikmati kemajuan dari keberhasilan kapitalis. Bisa dikatakan buruh sudah mencair, menjadi entitas yang lebih luas lagi dalam masyarakat termasuk kelompok-kelompok

marginal. Oleh karena itu revolusi bukan lagi seperti yang digambarkan oleh Marx, sekarang lebih menekankan pada aspek menumbuhkan kesadaran kritis terhadap situasi kapitalisme modern. Habermas menemukan jalan bahwa bagaimana kesadaran kritis dituangkan dalam kondisi riil di masyarakat dengan mengadakan transformasi sosial lewat *public sphere*.

Institusi Public Sphere

Media massa, masyarakat sipil, dan ruang publik dalam kaitannya dengan membangun sistem demokratis, menjadi perhatian banyak kalangan, khususnya setelah diterjemahkannya buku Jurgen Habermas (1962) yang berjudul *The Structure Transformation of the Public Sphere* ke dalam bahasa Inggris (1989). Tulisan ini telah dijadikan referensi dalam membahas ruang publik (*public sphere*) dalam kehidupan politik yang bertolak dari perkembangan masyarakat modern yang aktif dalam kegiatan komunikasi yang bebas dominasi.

Public sphere meliputi seluruh wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan bagi pembentukan opini publik dan seluruh masyarakat berhak untuk memasuki dunia tersebut. Secara umum dikatakan bahwa sebuah ruang publik disediakan untuk debat publik yang otonom dan terbuka, perbincangan mengenai kepentingan umum yang diikuti oleh orang-orang privat. Akses ke ruang publik adalah bebas, di mana kebebasan mimbar, asosiasi dan ekspresi dijamin. Ruang berada antara masyarakat basis dan top, dan memediasi hubungan di antara keduanya. Basis adalah ruang privat dari kehidupan warga individu, sementara institusi politik ada di pusat atau di paling atas bagian kehidupan publik.

Habermas mengangkat *coffee house* pada abad 18 sebagai ruang publik kaum borjuasi, sebuah forum di mana surat kabar dan majalah didiskusikan dalam kelompok diskusi yang terdapat di dalamnya referensi dan kepentingan sosial yang membentuk hubungan antarkelas, aristokrasi dan bisnis.

Ruang publik independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan gereja dan negara. Selain itu Habermas menjelaskan ketika pertama media dibentuk merupakan bagian integral dari ruang publik, tetapi kemudian peran media sebagai ruang publik menjadi berkurang ketika komodifikasi terhadap distribusi massa dan akuisis terjadi ketika *audience* dijual pada pemasangan iklan.

Dalam sejarah perkembangan masyarakat di Barat, telah terjadi perubahan struktural dalam dunia publik. Secara historis, dunia publik baru terbentuk pada abad ke-18, lewat perkembangan masyarakat borjuasi. Peran raja dan peran kaum ningrat, pada abad pertengahan netral dari konsep publik. Akan tetapi orang yang memiliki status kebangsawanan menyatakan secara publik sebagai wakil dari kekuasaan masyarakatnya. Ide perwakilan rakyat masih bertahan dalam masyarakat aristokrasi modern, tetapi sementara pemerintahan formal menjalankan kekuasaannya untuk rakyat, maka para ningrat menjalankan kekuasaan di hadapan rakyat.

Digambarkan oleh Habermas, pada abad ke-17 publik di Perancis berarti pengajar, penonton, dan editor yang diposisikan sebagai konsumen, kritiknya mengenai seni dan literatur, tetap merujuk pada istana, dan kemudian pada kaum ningrat perkotaan pada strata atas. Selanjutnya publik seringkali diperbandingkan dengan istana dan 'town' (kota atau masyarakat). Barulah pada masa pemerintahan Philip Orleans yang memindahkan kerajaan dari Versailles ke Paris, mengurangi posisi sentral istana sebagai ruang publik. Sedangkan 'masyarakat' mengambil alih transformasi fungsi budaya dalam ruang publik. Tetapi ruang publik pada abad ke-18 seperti salon, masih terdiri atas penulis terkenal, artis, ilmuwan yang berasal dari kaum borjuasi, merekalah yang aktif dalam memperdebatkan masalah-masalah publik.

Di Perancis, kaum bangsawan menerima kaum intelektual sebagai kaum yang setara dengan mereka. Dalam salon, pemi-

kiran tidak lagi berpusat pada kaum patron, dan opini terlepas dari ikatan ketergantungan ekonomi. Misalnya digambarkan bagaimana kaum aristokrat, borjuasi bisa sama kedudukannya dengan intelektual. Salon memainkan peran monopolinya sebagai tempat publikasi pertama.

Lain halnya di Inggris Raya, di mana istana tidak akan pernah didominasi oleh masyarakat seperti halnya di Perancis. Di bawah kekuasaan Stuarts, sampai Charles II, literatur dan seni merupakan representasi raja. Barulah setelah revolusi, kemegahan istana semakin berkurang. Keunggulan 'masyarakat' diperkuat dengan institusi baru yang variasinya di Inggris Raya dan Perancis mengambil alih fungsi sosial yang sama. Kedai kopi mencapai masa kejayaan pada tahun 1680 dan 1730, dan salon dalam periode antara masa perwalian dan revolusi. Perubahan terjadi setelah revolusi, istana dilihat sebagai tempat yang terkucil dan sulit dimasuki. Dominasi kota menguat dengan munculnya banyak *coffee house* (sebagaimana salon di Perancis) sebagai pusat kritisisme dalam sastra dan politik yang melibatkan kelompok masyarakat aristokrat dan borjuasi. Diskusi yang awalnya membicarakan sastra dan seni kemudian meluas ke soal ekonomi dan politik. Publik dalam *coffee house* ini umumnya adalah kaum laki-laki dari kedua golongan masyarakat tersebut, yang kemudian meluas pada masyarakat kelas menengah. Kaum perempuan dapat terlibat dalam kritisisme sastra dan seni, namun tidak pada pembicaraan mengenai ekonomi dan politik.

Pada abad ke-17, di Jerman tidak ada 'kota' yang menggantikan publikasi representasi istana dengan institusi ruang publik dalam masyarakat madani (*civil society*). Tapi pada abad ke-17 ada yang namanya *Tischgesellschaften* (*table society*/masyarakat formal) dan *Sprachgesellschaften* (*literary society*/masyarakat pembaca). Jumlah mereka sedikit dan tidak seaktif masyarakat *coffee house* dan salon. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pe-

kerjaan produktif, dengan pendidikan kelas menengah. Tata tertib, perlemen dan akademi diinterpretasikan sebagai media komunikasi dan pemahaman masyarakat sebagai manusia. Elemen utama dalam publik ini bukanlah kesetaraan politik, melainkan eksklusivitas menghadapi absolutisme. Belakangan masih dipadati oleh para pangeran, tapi menolak eksklusivitas sosial yang kemudian berupaya mentransformasikannya ke dalam peran kesatriaian tetapi gagal. Majelis dan akademisi berupaya mewujudkan keadilan dengan berkomunikasi dan memahami rakyat dengan menggunakan bahasa sehari-hari untuk alasan manusiawi dengan menggunakan karakter dialektika.

Berikut beberapa ciri institusi publik yang ditemukan dalam ketiga konteks, yaitu: *Pertama*, dalam publik terdapat hubungan sosial yang mengabaikan status sosial yang kemudian memunculkan kesamaan dalam kemanusiaan bersama (*common humanity*). Kaum *private gentlement* mengubah publik tidak hanya dalam soal hilangnya pengaruh kekuasaan dan prestise tetapi juga ketergantungan pada ekonomi. Maksudnya dengan kesamaan dalam kemanusiaan diharapkan masing-masing pihak dapat leluasa menyampaikan opini dalam diskusi publik. Selain itu konteks dimana diskusi publik terjadi, seperti di kedai kopi dan salon, juga memungkinkan terjadinya diskusi informal dan santai.

Kedua, diskusi publik membicarakan masalah-masalah yang sebelumnya tidak disentuh. Objek perhatian publik kritis secara umum adalah tentang dominasi gereja dan negara dalam interpretasi filsafat, sastra, seni dan bahkan pada saat perkembangan kapitalisme membutuhkan sikap rasional. Perubahan muncul ketika produk budaya bukan lagi sebagai komponen dari publikasi representasi gereja dan istana. *Ketiga*, proses yang sama yang mengubah budaya menjadi komoditi telah membentuk publik menjadi inklusif. Isu yang didiskusikan menjadi umum. Setiap orang dapat berpartisipasi. Publik seringkali merupakan

bagian dari publik lain yang lebih besar dengan isu diskusi yang lebih luas. Publik yang terbentuk pada awalnya publik yang kecil karena massa kebanyakan buta huruf dan memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam arus komersialisasi produk budaya menemukan berbagai publik sehingga sebuah kategori sosial baru muncul.

Karena perlindungan dari kaum bangsawan membuat situasi aman pada waktu itu, sehingga kebutuhan para petani akan barang-barang mewah meningkat yang dipakai oleh kaum bangsawan. Kaum bangsawan merendahkan profesi pedagang, sehingga memunculkan peluang untuk menjadi pedagang. Dalam pengertian kaum Marxian, kaum Borjuasi ini adalah kaum pedagang karena ada peluang untuk jual beli barang. Dalam pandangan Marxian kaum Borjuasi adalah kaum pedagang merupakan antitesis terhadap kelas bangsawan.

Munculnya gagasan pencerahan di abad 17 ini akan memunculkan sistem pemerintahan demokratis. Kaum Borjuasi yang tugasnya melakukan perdagangan itu, mengalami perkembangan yang luar biasa. Orang tidak lagi sekedar bertukar informasi, tapi juga bertukar pendapat. Abad pencerahan telah membawa perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang paling penting adalah nilai ekualitas karena pada dasarnya manusia adalah sama. Sebelumnya di saat feodal tidak bisa. Kerajaan dan gereja merupakan wakil Tuhan. Munculnya masa pencerahan menyatakan bahwa semua orang sama. Revolusi Perancis menjadi inspirasi bagi Marx ketika berpikiran bahwa revolusi sosial atau kelas akan muncul.

Nilai-nilai yang didegungkan pada masa pencerahan, di abad 18 memunculkan ide mengenai ruang publik. Sebuah lingkungan publik di mana dalam lingkungan itu orang *equal*, orang yang masuk ke sini sama derajatnya. Habermas membuat cetak biru bahwa *public sphere* bisa dibagi menjadi seperti ini. Ini adalah sisa dari masa feodalisme negara punya peranan yang penting. *State* diwakili oleh ranah yang terkait

dengan keamanan. Di satu sisi ada yang namanya ranah otoritas publik. Di masa feodalisme, istana dan fungsi-fungsi yang memelihara keamanan (*state*) yang mengatur otoritas publik. Di sini masih dibedakan antara ranah *state* dan ranah *private*.

Kemudian muncul gagasan *civil society*, terjadi proses pertukaran komoditas dan sosial, pembagian kerja di ranah privat. Dalam ranah privat juga ada *space internal*, ruang keluarga Borjuasi. Muncul *public sphere* yang terkait dengan realitas politik, 'the world of labour' terjadi ketika arus berita (*traffic of news*) berubah menjadi arus informasi (*traffic of information*) yang kemudian muncul orang tidak lagi sekedar membicarakan berita tapi juga sudah membahas dan mengulas informasi di salon, kedai kopi, *club*. Semua ini ada di kota. Di sini adalah sebuah ranah di mana status sosial bisa menjadi melebur.

Munculnya kebiasaan untuk membacakan, mendiskusikan sastra di sini, kemudian menimbulkan kebiasaan-kebiasaan mendiskusikan masalah politik di media, munculah *public sphere* politik. Kekuasaan bangsawan dengan mekanisme perubahan sosial berubah dari sistem monarki ke sistem demokrasi. Di mana orang tidak bisa lagi mengatur kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang banyak (masyarakat) diatur oleh orang-orang yang dipilih oleh banyak orang tersebut. Sistem yang ditawarkan oleh kapitalis, masyarakat membuat kontrak untuk menyerahkan kepentingannya pada segelintir orang (Rosseau).

Ketika orang mendiskusikan sastra, puisi, cerita di kalangan masyarakat Eropa ada komunitas literatur. Di sini perempuan masuk, tapi dalam pembicaraan politik dan lain sebagainya perempuan tidak masuk. Karena sistem ini juga meng-*exclude*-kan perempuan. Dianggap yang bisa mengurus kepentingan publik adalah laki-laki. *Public sphere* terkait dengan kepentingan umum, misalnya mendiskusikan isi media untuk membicarakan bagaimana selanjutnya sebuah negara dijalankan. Atau dalam istilah

lain dikatakan sebagai *public goods* untuk membicarakan kebutuhan publik. Orang berkumpul untuk membicarakan kepentingan publik tanpa memandang latar belakang, tapi orang mendiskusikan sesuatu yang dianggap dapat mewakili kepentingan publik.

Muncul ide awal tentang demokrasi karena ekualitas orang untuk berdiskusi dan ekualitas orang untuk berpendapat sangat dijaga pada masa ini, akses terbuka, tidak ada ketakutan orang akan ditangkap karena pendapatnya. Habermas adalah orang sangat luar biasa memberikan apresiasi pada bidang komunikasi, bahwa semua berkaitan dengan masalah komunikasi. *Public sphere* yang ideal ada pada abad ke-18, yaitu dimana posisi setiap orang sejajar atau sama kedudukannya, orang bisa mendiskusikan apa saja tanpa adanya hambatan, dan membedakan secara tegas antara ranah *state* dan ranah *private*.

Public sphere merupakan celah ruang di antara negara (*state*) dan masyarakat sipil (*civil society*), dimana setiap warga negara bisa melibatkan diri dalam diskursus tentang masalah sosial dan untuk melakukan kontrol terhadap negara dan pasar (*market*). Celah tersebut dapat diisi dan diperankan oleh media massa sebagai pemain sentral yang memasok dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap.

Habermas mengecam proses revolusi yang berlangsung melalui kekerasan. Adapun solusi dapat diperoleh dari argumentasi dalam bentuk wacana dan kritik (dalam Hardiman, 1993). Melalui konsensus yang diperoleh dari dialog dan komunikasi dalam kekuatan-kekuatan politik, maka terwujud percakapan rasional yang berfungsi kritis dan praktis. Demikian pentingnya peran komunikasi, maka paradigma komunikasi bagi Habermas memiliki proses sinergi dengan paradigma kerja dari Marx. Berangkat dari kritik terhadap rasionalitas, pemikiran Habermas berkembang menuju pembaharuan teori kritis yang melibatkan tindakan komunikatif (*communicative ac-*

tion) yang ditransformasikan dalam konsepsi ruang publik (*public sphere*).

Konsepsi ruang publik sebagai arena pertarungan wacana berkembang dalam praktik demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mendasarkan asumsinya pada tindakan komunikatif dalam bentuk pertarungan wacana. Arena tempat berlangsungnya pertarungan wacana inilah yang disebut dengan ruang publik. Oleh karena itu, dalam konsepsi ini, ruang publik tidak diartikan secara fisik tetapi merupakan ruang sosial (*social space*) yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif. Ruang publik menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu yang berkembang dalam tataran elit maupun massa. Pembentukan opini publik melalui debat publik akan memiliki kekuatan (*communicative power*) untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang secara formal dilakukan melalui mekanisme perwakilan.

Kemampuan mempengaruhi tersebut dilakukan melalui opini publik yang terbentuk dari diskursus publik. Dengan demikian, kekuatan pengaruh dari deliberasi yang berlangsung dalam ruang publik terletak pada bagaimana isu-isu dibentuk, didefinisikan, dan dipublikasikan, yang artinya merupakan bagian dari proses kontestasi diskursus dalam debat publik. Dalam proses ini, masing-masing pihak saling bertukar argumen rasional untuk mempengaruhi pihak lain sehingga preferensi seseorang terhadap suatu isu dapat diubah sampai akhirnya terbentuk kesepakatan atau konsensus.

Pada hakikatnya, pembentukan ruang publik dapat dilihat dari munculnya wacana alternatif yang mampu menandingi wacana utama (*main discourse*). Relasi kekuasaan yang dominatif terefleksikan dalam produksi dan reproduksi kuasa yang masuk dalam ruang kultural, yakni tempat wawasan dan makna dikomunikasikan dalam berbagai wacana yang saling berkompetisi. Wacana tandingan merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi penguasa yang

dipertahankan melalui struktur teks, pilihan kosakata, dan gramatika yang membentuk pemaknaan terhadap suatu realitas politik.

Untuk mengukur ketersediaan ruang publik, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap pertarungan wacana yang berlangsung dalam ruang publik untuk memperoleh gambaran bagaimana suatu wacana tandingan (*counter discourse*) dibuat dan ditampilkan. Pemaknaan terhadap wacana yang muncul, baik wacana utama maupun wacana tandingan dianalisis dengan mengacu pada konteksnya, yakni konteks sosial, yakni bagaimana produksi dan reproduksi wacana tentang suatu fenomena dihubungkan dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat lokal. Termasuk juga dengan aspek-aspek budaya politik lokal, seperti praktik kekuasaan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan setempat. Konteks pertarungan wacana inilah yang akan menjelaskan proses produksi dan reproduksi makna dari suatu opini publik.

Kaitan opini publik dengan interaksi kritis terletak pada proses interpretasi yang berlangsung antara kaidah ilmiah dengan permasalahan praxis. Opini publik akan menjadi dasar bagi pengilmiahan politik dalam interaksi kritis. Isyarat bahwa rasionalisasi kekuasaan termaktub dalam model pragmatis, nampak pada pernyataan Habermas bahwa rasionalisasi kekuasaan sudah terbentuk apabila keinginan politis sudah tercapai dan proses pencerahan sudah menjwai keinginan politis tersebut. Bagi dunia publik itu sendiri terdapat kondisi ideal yang melingkupinya, namun juga terdapat “hambatan struktural” yang harus dihadapi. Letak permasalahan ada pada ketidaksiapan dunia ilmiah dan politis dalam masyarakat yang cenderung sulit membentuk dunia publik. Misalnya belum matangnya kondisi ilmiah di suatu negara sementara dominasi politis masih menjadi belenggu demokratisasi tentunya akan mempersulit berkembangnya institusi ruang publik.

Depolitisasi *Public Sphere*

Dalam esainya, *Technical Progress and Social Life-World*, Habermas memperlihatkan gejala lenyapnya fungsi pencerahan dari ilmu pengetahuan. Tesis pokok Habermas dalam esai ini adalah bahwa dalam situasi dewasa ini, masalah-masalah tingkah laku kehidupan memerlukan diskusi rasional yang tidak melulu memusatkan diri atau pada sarana-sarana teknis atau pada penerapan norma-norma tingkah laku tradisional. Masalah kaitan kemajuan teknis dan dunia kehidupan sosial dewasa ini, lalu menjadi masalah kaitan antara teknologi dan demokrasi. Sejauh “teknologi” dimengerti sebagai kontrol rasional ilmiah atas proses-proses yang diobjektifkan dan “demokrasi” sebagai bentuk-bentuk komunikasi umum dan publik yang terjamin secara institusional yang mengemukakan soal praktis tentang bagaimana manusia bisa dan ingin hidup dalam kondisi-kondisi objektif kekuasaan kontrol mereka yang selalu meluas, masalah di atas menjadi soal bagaimana kekuasaan kontrol teknis itu dapat diarahkan oleh konsensus para warga masyarakat (Hardiman, 1993 : 125).

Munculnya kapitalisme lanjut mulai abad 19 sampai dengan sekarang terjadi yang namanya “depolitisasi *public sphere*”. *Public sphere* sekarang telah mengalami erosi dimana kehidupan mulai dikomodifikasikan. Munculnya media massa pada mulanya dipahami negatif oleh Habermas karena *public sphere* mengandaikan orang bertemu tatap muka untuk mendiskusikan masalah publik atau orang membawa koran untuk didiskusikan bersama. Jadi hubungan orang menjadi erat. Tapi media elektronik membuat diskusi diatur sedemikian rupa, misalnya *talkshow* mengatur bagaimana orang berdiskusi dengan jeda iklan. Jadi itu tidak murni lagi. Dibayangkan oleh Habermas dalam *Ideal Speech Situation*, orang betul-betul bebas untuk berbicara, orang punya akses yang sama untuk berbicara, distribusi kekuasaan berlangsung secara simetris. Sangat ideal di abad 18 situasi

tersebut sangat mungkin bisa terjadi. Mulai abad 19 ketika komodifikasi terjadi dalam berbagai bidang, ruang publik yang diandaikan Habermas ada di abad 18 menjadi utopis.

Menurut Habermas masyarakat merupakan kombinasi dari tiga kepentingan yang saling berkaitan, yaitu: kerja (*work*), interaksi (*interaction*), dan kekuasaan (*power*). Dari ketiganya Habermas fokus pada terjadinya dominasi “kepentingan teknis” yaitu lewat “kerja” pada masyarakat kapitalisme modern. Kerja (*work*) berkaitan dengan usaha-usaha untuk menciptakan sumber daya material, yang dipengaruhi oleh kepentingan teknis yang didasari oleh pola pemikiran instrumental. Jadi ada persoalan-persoalan yang bisa diatasi dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material. Pastilah manusia butuh papan, sandang, dan pangan yang sifatnya material. Dengan kerja manusia bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Sehingga di sini ada upaya-upaya yang terkait dengan tujuan objektif untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Manusia punya tujuan tertentu dalam hidupnya, kemudian oleh manusia dipandukan dengan pemikiran yang instrumental. Salah satunya, teknologi membantu manusia dalam hal ini, dengan teknologi manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialnya. Kepentingan kerja mewujud dalam ilmu pengetahuan yang bersifat analitis-empiris, ilmu pengetahuan positivis.

Rasio kritis merupakan penguasaan atas kondisi-kondisi objektif yang mendeterminisme manusia, seperti alam. Penguasaan atas alam ini mengambil bentuk konkretnya di dalam kerja. Maka pada dasarnya apa yang dipahami teori kritis mengenai konsep rasionalitas adalah dalam paradigma kerja. Mereka masih mengikuti kesalahan Marx yang mengandaikan praxis sebagai kerja.

Habermas melihat unsur-unsur modernitas, seperti teknologi, ilmu-ilmu empiris dan positivis sebagai cara berpikir yang penting bagi salah satu dimensi dari

praxis hidup manusia, yaitu kerja. Dengan jalan ini, manusia berhasil membebaskan diri dari alam eksternalnya. Tetapi Habermas menolak penerapan cara berpikir positivis sebagai ideologi dan saintisme karena positivisme mengklaim diri sebagai pengetahuan sejati yang meliputi segala bidang, termasuk kehidupan sosial manusia (dalam Hardiman, 2004 : 84-85). Rasionalitas yang kognitif-instrumental, menurut Habermas sudah tidak mewakili kondisi jaman, dan sebaliknya dikembangkan menjadi rasionalitas berdimensi komunikasi.

Selain kepentingan material, manusia juga punya “kepentingan praktis” yaitu bahwa ketika orang hidup bersama punya kebutuhan praktis untuk bekerja sama melalui bahasa. Komunikasi merupakan aspek esensial dalam proses emansipasi yang dilakukan melalui bahasa, dan komunikasi juga merupakan praxis di samping kerja. Bahasa dan simbol merupakan suatu hal yang muncul untuk kepentingan berinteraksi (*interaction*) yang didasari oleh cara berpikir praktis. Karena untuk kerja sama dengan orang lain, seseorang harus menguasai cara berkomunikasi dengan orang tersebut, melalui penguasaan bahasa. Sehingga kepentingan bersifat interaksional ini lewat rasional praktis ini kemudian dipelajari lewat ilmu pengetahuan, sejarah, dan hermeneutika.

Selain kerja dan interaksi, di dalam realitas masyarakat terjadi juga “kepentingan untuk menguasai”. Ada kepentingan kekuasaan (*power*) yang mempersoalkan bagaimana distribusi kekuasaan tercipta. Dengan distribusi kekuasaan ini akan tercipta dominasi-dominasi, yang salah satunya dapat dilakukan melalui distorsi komunikasi. Kekuasaan ini terkait dengan kepentingan emansipatoristik, yaitu kepentingan membebaskan manusia, kepentingan untuk kesadaran yang didasarkan pada refleksi diri, dan kepentingan-kepentingan dasar manusia akan emansipasi menyatakan diri.

Dengan kepentingan emansipatoristik ini diharapkan dapat dilakukan pember-

dayaan terhadap diri sendiri dulu, sebelum kemudian dapat memberdayakan masyarakat. Kalau tidak diberdayakan maka orang miskin akan berpikir, saya miskin karena Tuhan menghendaki saya miskin, karena struktur sosial yang membuat saya miskin. Bahkan manusia juga bisa berpikir karena memang rejeki saya sedikit, maka saya jadi miskin. Padahal struktur bisa membuat seseorang menjadi miskin. Kepentingan kekuasaan ini diwujudkan dalam ilmu pengetahuan yang bersifat kritis atau ilmu kritis. Jadi kalau kita berpikir kritis, kita akan selalu berpikir curiga, mempersoalkan adanya kekuasaan yang timpang yang sudah terjadi di realita.

Titik tolak yang digunakan dalam teorinya, Habermas menggunakan sistem ekonomi pasar yang kapitalistik itu selalu dalam kondisi tidak stabil karena selalu ada naluri untuk menguasai semua meskipun pasar muncul karena adanya kebutuhan dari manusia. Pasar adalah tempat bertemunya beragam kebutuhan manusia, sehingga terjadi transaksi di dalamnya. Tapi ternyata sifat pasar yaitu ingin menguasai apapun yang dihasilkan, maka kecenderungannya ke arah monopolistik sangat kuat. Akhirnya negara perlu melakukan intervensi untuk membuat kondisi pasar yang tidak monopolistik.

Negara melakukan intervensi supaya pasar stabil lewat birokrasi pada semua aspek kehidupan. Birokratisasi semua aspek kehidupan manusia dilakukan lewat prosedur administratif dan lewat teknologi. Karena lewat dua hal ini maka kepentingan-kepentingan instrumental yang terkait dengan kepentingan pasar bisa dicapai. Dengan cara berpikir yang seperti ini sebenarnya negara sudah mulai mengedepankan cara-cara berpikir yang dilandasi oleh kesadaran teknokratis yang dilandasi oleh kepentingan yang bersifat teknis. Semua ini terkait dengan cara-cara berpikir yang instrumental dan cara-cara yang bersifat teknis. Negara akhirnya mengurus hal-hal yang bersifat teknis ini. Negara kemudian men-

coba untuk menyebarkan arti penting dari kesadaran yang bersifat teknokratis ini.

Upaya negara melakukan penyebaran arti penting dari kesadaran yang bersifat teknokratis ini menimbulkan apa yang disebut “depolitisasi *public sphere*”. *Public sphere* intinya adalah mendiskusikan kepentingan umum secara bersama untuk kepentingan orang banyak. Tapi negara membuat kepentingan-kepentingan umum ini menjadi kepentingan-kepentingan teknis. Jadi isu kepentingan umum kemudian dijadikan isu kepentingan teknis. Akibatnya, karena adanya intervensi negara dengan birokratisasi sedemikian rupa dalam semua aspek kehidupan ini, maka kita banyak diwarnai oleh cara-cara berpikir yang sifatnya teknokratis. Sehingga kemudian yang terjadi *public sphere* tidak mengurus hal-hal yang bersifat untuk kepentingan umum, tetapi bersifat teknis atau bahkan mungkin tidak untuk kepentingan bersama.

Universal Pragmatics

Hal yang ditawarkan oleh Habermas dalam *Universal Pragmatics* (1998 : 21-92) adalah yang kita hadapi sebenarnya yaitu persoalan-persoalan yang terkait dengan praxis. Bagaimana negara dengan birokratisasinya itu menyebabkan kepentingan teknokratis, kepentingan teknis yang lebih didahulukan, dibanding dengan kepentingan yang terkait dengan *power* ataupun kepentingan yang terkait dengan praktis. Sehingga kepentingan teknis mendominasi kepentingan yang lainnya itu.

Dengan demikian persoalannya kemudian lebih banyak ke persoalan komunikasi, bagaimana membelokkan hal-hal yang mestinya membicarakan kepentingan umum, tetapi lebih banyak membicarakan kepentingan teknis. Di sini Habermas merasa bahwa untuk membuat *public sphere* lebih bagus lagi pelaksanaannya, maka *public sphere* harus dikembalikan pada kondisi awal dimana ada sebuah forum untuk masyarakat berdiskusi mengenai kepentingan umum secara bebas tanpa intervensi negara.

Karena dengan birokratisasi tadi akan bertemu dengan yang namanya aturan-aturan yang bersifat regulatif dan konstitutif yang semuanya diurus oleh negara. Misalnya untuk yang terkait dengan media massa ada yang namanya undang-undang kebebasan pers, undang-undang penyiaran, dan sebagainya yang salah satunya mengatur diskusi publik di media. Padahal hal-hal seperti ini yang membuat *public sphere* tidak seperti yang dibayangkan Habermas, mestinya rakyat dibebaskan untuk membicarakan kepentingan umum untuk kepentingan bersama juga. Sementara yang terjadi adalah kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan teknis yang mendominasi *public sphere* sekarang.

Upaya untuk mempolitisasi kembali *public sphere* ini bisa dilakukan melalui *Universal Pragmatics*. Karena lewat *universal pragmatics* yang juga disebut dengan “teori tindakan komunikatif (*the theory of communicative action*)” dasarnya adalah “*speech act theory*”. Habermas mencoba untuk menunjukkan bahwa munculnya persoalan-persoalan sebetulnya karena dilandasi oleh kepentingan praktis sehingga penyelesaiannya juga seharusnya demi kepentingan praktis tapi yang membebaskan. Di sini *speech act* yang terdiri dari *constatives*, *regulatives*, dan *avowals* dianggap sebagai salah satu cara yang mampu untuk mengatasi terjadinya depolitisasi *public sphere*. Karena dengan *speech act* ini kemudian setiap orang ketika melakukan tindakan komunikatif, dia bisa datang dengan beragam argumen yang dapat menjelaskan persoalan yang didiskusikan.

Constatives terkait dengan persoalan kebenaran, *regulatives* terkait dengan persoalan kelayakan, dan *avowals* terkait dengan persoalan kejujuran. Setiap tindakan komunikatif harus mengandung unsur-unsur kebenaran, kelayakan, dan kejujuran. Jenis *speech act* menentukan validitas yang harus dipenuhi dalam pernyataan atau argumentasi. *Constrative* dirancang untuk menjelaskan kebenaran proposisi. *Regulatives* dila-

kukan untuk mempengaruhi hubungan seseorang dengan yang lainnya melalui pengaturan tertentu. *Avowals* dirancang untuk mengekspresikan kondisi internal pembicara untuk menegaskan sesuatu mengenai orang lain.

Media berperan dalam membentuk mekanisme bahwa apa yang disajikan dalam media sebagai sebuah kebenaran. Tapi yang muncul adalah wacana kekuasaan yang sama sekali tidak mengandung unsur validitas komunikatif. Hal ini dimungkinkan terjadi karena depolitisasi ruang publik sudah terjadi. Akibat yang memperbolehkan pengusaha untuk jadi penguasa yang membuat kebijakan publik, maka ada banyak hal yang diterjang begitu saja sehingga aturan-aturan bersama tidak diperhatikan lagi.

Hal lain yang menjadi pemikiran Habermas adalah bahwa sistem ekonomi pasar kapitalisme modern ini menyebabkan kolonisasi *life-world* (kesatuan antara teori dan praxis). Dunia kehidupan sehari-hari manusia dikolonisasi oleh sistem. Jadi di dalam kapitalisme lanjut, Habermas mengandaikan ada tiga hal yang dianggap penting yaitu elemen yang terkait dengan ekonomi, politik/administrasi dan kultur/budaya. Kolonisasi *life-world* akan terjadi apabila dua elemen pertama mengkooptasi elemen yang ketiga. Apabila ekonomi dan politik/administrasi menguasai kultural, maka akan terjadi kolonisasi *life-world* yaitu bahwa kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat material. Karena kehidupan kita yang dipandu oleh kultur yang terkait dengan kepentingan praktis akan banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan teknis (dalam ekonomi dan politik/administrasi).

Di dalam teori tindakan komunikatif (*communicative action*), Habermas menyebutkan tentang *ideal speech situation* sebagai suatu bentuk komunikasi yang ideal dan harus diperjuangkan di mana rasionalitas individu dikembangkan melalui berbagai argumen yang dituntut dalam setiap

klaim dan komunikasinya. Ruang yang memungkinkan terciptanya situasi percakapan yang ideal, di mana setiap dialog dilakukan melalui validitas klaim-klaim (*validity claims*) yang diajukan atas dasar rasionalitas individu yang argumentatif.

Oleh karena itu melalui *universal pragmatics* akan tercipta yang disebut dengan situasi komunikasi yang ideal, yaitu tindakan komunikasi dimana orang bebas terlibat, mempunyai akses yang sama, dan mempunyai kekuasaan yang sama. Sehingga *public sphere* akan kembali ke esensinya, kembali ke bentuk idealnya yaitu ketika kita mampu mengembalikan depolitisasi *public sphere* kepada politisasi *public sphere*.

Kepentingan ekonomi dapat mendorong media massa untuk memunculkan aktor-aktor baru yang mampu memberikan alternatif pandangan terhadap suatu isu. Kemunculan aktor-aktor baru yang belum masuk dalam lingkaran elit penguasa diharapkan mampu memberikan pemaknaan yang relatif terbebas dari kepentingan pelanggaran kekuasaan. Strategi pelaku media untuk memunculkan pelontar wacana yang tidak termasuk lingkaran elit penguasa ini juga dimaksudkan untuk memunculkan wacana alternatif yang dapat mengatasi kejenuhan masyarakat akan berita-berita politik dari perspektif yang sama sehingga proses deliberasi tidak terjebak dalam alur pertarungan argumentasi yang monoton.

Permasalahannya, konsep ruang publik yang berasal dari demokrasi liberal lebih terfokus pada dimensi prosedural sehingga yang dipentingkan adalah tersedianya ruang yang sebanyak mungkin bagi pertarungan wacana. Namun siapa aktor yang mengisi atau memiliki akses ke dalam ruang tersebut tidak dipermasalahkan. Akibatnya, mereka yang dapat bertarung dalam ruang-ruang publik hanya dari kalangan elit yang memiliki sumber daya, baik finansial maupun pengetahuan. Karenanya, keberadaan ruang publik justru menjadi dilema bagi perkembangan demokrasi lokal. Padahal

jargon yang selalu dikemukakan adalah bagaimana memperluas ruang publik.

Depolitisasi *public sphere* ini terkait dengan krisis politik yaitu adanya ketidakmampuan politik-administratif untuk menciptakan aturan-aturan yang instrumental yang benar-benar menjawab kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga menyebabkan orang tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, misalnya semakin banyak orang yang tidak mau terlibat dalam pemilihan umum, dalam proses pengambilan keputusan bersama sebetulnya krisis legitimasi terjadi.

Perluasan ruang publik berkaitan erat dengan kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk memproduksi wacana tandingan untuk melawan hegemoni wacana utama. Wacana tandingan tidak akan dapat terbentuk bila pertarungan wacana berlangsung secara tidak seimbang di mana penguasa menentukan bagaimana suatu isu dibentuk, didefinisikan, dan dipublikasikan. Proses deliberasi ini rentan dengan dominasi elit karena hanya kelompok elitlah yang memiliki akses untuk membentuk, mendefinisikan, dan mempublikasikan isu.

Dominasi elit dan kapital dalam membangun wacana merupakan kecenderungan yang harus diwaspadai dari perluasan ruang publik. Bila kecenderungan ini tidak diantisipasi, maka perluasan ruang publik akan menjadi sia-sia karena masyarakat luas justru menjadi pihak yang tidak memiliki akses terhadap ruang publik tersebut, sehingga ruang publik yang terbentuk bukan merupakan ruang publik yang otonom. Ketersediaan ruang publik menjadi lebih efektif untuk memunculkan wacana tandingan apabila diimbangi dengan perubahan struktural dalam masyarakat, terutama menyangkut hubungan antara elit dengan massa. Desain hubungan elit dan massa lebih diarahkan pada pola interaksi yang transaksionis dan bukan instruksionis.

Karena itu, penggunaan bahasa, baik dari segi struktur maupun substansinya, harus membuka peluang bagi seluruh pihak untuk menguji validitas klaim yang diajukan pihak lain.

Kesimpulan

Persoalannya sekarang, kebebasan media sepertinya kebablasan, persoalan etika dan profesionalisme media seringkali terabaikan. Kondisi ini diperparah dengan munculnya berbagai bentuk media dengan berbagai *genre of content* baik dari yang berkarakteristik erotis seperti harian Lampu Merah, majalah Playboy, hingga yang berkarakter politik seperti tayangan ‘Selebriti Juga Manusia di stasiun TransTV. Persoalan etika dan profesionalisme merupakan suatu masalah pelik untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Karena setiap negara memiliki karakteristik budaya tersendiri untuk mendefinisikan etika dan profesionalisme medianya.

Untuk menjaga independensi, media harus memiliki kode etik serta prinsip profesionalisme sebagai suatu upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi media, masyarakat dan komersialisme. Kode etik sering kali tidak sama antara suatu negara dengan negara lainnya, karena kode etik merefleksikan konvensi dan tradisi sosial budaya suatu negara.

Daftar Pustaka

Baran, Stanley J. & Dennis K. Davis. “*Mass Communication Theory: Foundation, Ferment and Future*”. Wadsworth, Belmont, 2002.

Carey, James W. “*A cultural approach to communication*.” dalam Mcquail, Denis. *McQuail’s Reader in Mass Communication Theory, Part II : Conceptual Issues and Varieties of Approach*”. Sage Publications, London, 2002, hal 36-45

Garnham, Nicholas. “*The Media and The Public Sphere Chapter 29*.” Dalam Oliver Byod-Barret & Chris Newbold (eds.). *Approaches to Media: A Reader*”. Arnold, London, 1995.

Gitlin, Todd. “*Media Sociology :The Dominant Paradigm*.” dalam Denis Mcquail. *McQuail’s Reader in Mass Communication Theory, Part II : Conceptual Issues and Varieties of Approach*”. Sage Publications, London, 2002, hal 25-35.

Habermas, Jurgen. “*The Structural Transformation of the Public Sphere*”, (diterjemahkan oleh Burger T.). Dalam Boyd-Barrett, Oliver, & Chris Newbold. “*Approaches to Media: A Reader*”. Arnold, London, 1995, hal 235-244.

_____. *On the Pragmatics of Communication*, (diedit oleh Maeve Cooke). The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1998.

_____. *Krisis Legitimasi*, (diterjemahkan oleh Yudi Santoso). Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2004.

Hardiman, Fransisco Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Posmodernisme menurut Jurgen Habermas*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.

_____. *Kritik Ideologi, Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Penerbit Buku Baik, Yogyakarta, 2004.

McQuail, Denis. *McQuail Reader in Mass Communication Theory*. Sage Publication, London, 2002.

_____. *McQuail's Mass Communication Theory 5rd Edition*. Sage Publications, London, 2005.

Suseno, Franz Magnis. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Zoonen, Liesbet van. *A new Paradigm?*. dalam Denis McQuail. *McQuail's Reader in Mass Communication Theory, Part II : Conceptual Issues and Varieties of Approach*. Sage Publications, London, 2002, hal 46-59